

Women's Participation In Islamic Education In Indonesia And Saudi Arabia

Asnal Mala

Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso Ii Waru, Sidoarjo , Jawa Timur. Indonesia

Email: Malaasnal12@Gmail.Com

ABSTRACT

This study aims to describe women's participation in Islamic Education in Indonesia and Saudi Arabia. The design of this research is a qualitative research, a library research approach. Data were analyzed using a descriptive comparative analysis approach on the social construction of gender differences that gave birth to gender inequalities in Indonesia and Saudi Arabia. The results of the study show that there are still gaps in women's education participation, especially in Islamic education, this can be seen that there are still restrictions on opportunities to receive education and there is still a gender bias in subject matter and classical texts that must be reinterpreted. All parties involved in Islamic educational institutions must be sensitive to the gaps that occur, both in the learning process, and in textbooks that are gender biased, which are still often found in subject matter that visualizes women in an inferior position and men in superior position. Also included in the study of religious texts which were found to contain interpretations of misogyny (hatred of women). This requires sensitivity and awareness to reconstruct the context of inequality together.

Keywords: Women's Participation, Islamic Education, Gender

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam Pendidikan Islam di Indonesia dan Arab Saudi. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan penelitian studi pustaka (*library reseach*). Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif tentang konstruksi social tentang perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan (*gender inequalities*) di Indonesia dan Saudi Arabia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang terjadi pada partisipasi pendidikan perempuan khususnya dalam Pendidikan islam, hal ini terlihat masih ada pembatasan kesempatan mengenyam pendidikan dan masih ada bias gender terdapat dalam materi pelajaran dan teks-teks klasik yang harus di reinterpretasi. Seluruh pihak yang terkait dalam institusi pendidikan Islam harus memiliki sensitifitas terhadap kesenjangan yang terjadi, baik dalam proses pembelajaran, maupun pada buku-buku pelajaran yang bias gender, masih sering ditemukan pada materi-materi pelajaran yang memvisualisasikan perempuan pada posisi

inferior dan laki-laki pada posisi superior. Termasuk pula dalam kajian teks-teks keagamaan yang dijumpai mengandung interpretasi misogini (membenci perempuan). Hal ini membutuhkan kepekaan serta kesadaran untuk merekonstruksi konteks ketidaksetaraan tersebut secara bersama-sama.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Pendidikan Islam, Gender

A. INTRODUCTION

Partisipasi perempuan dalam pendidikan Islam masih menjadi perjuangan bagi banyak perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan terutama di negara Saudi Arabia yang memiliki peringkat terendah dalam hal hak dan kedudukan perempuan. Arab Saudi adalah negara yang konservatif dan kental dengan pengaruh sosial dan agama. Beberapa praktik adat di Arab Saudi yang melarang perempuan mengemudi atau terlibat dalam profesi seperti hukum dan insinyur tidak didasarkan pada hukum Islam, tetapi lebih pada stigma masyarakat dalam menjaga tradisi budaya (Hamdan, 2005).

Pada masa Raja Abdullah bin Abd Aziz, alokasi anggaran pendidikan mencapai 27% dari total belanja pemerintah Arab Saudi. Para pemuda Arab Saudi diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi ke luar negeri, seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang, Malaysia, dan negara-negara lainnya (Hendra Yunal, 2022). Perempuan telah menganggap bahwa pendidikan dapat memberdayakan kehidupan baik dalam karir dalam memilih profesi yang berasal dari negara berpenghasilan menengah (Samarakoon & Parinduri, 2015). Pemerintah Saudi terus berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan perempuan dengan keyakinan bahwa pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat melalui berbagai metode (Al Alhareth, Al Dighrir, & Al Alhareth, 2015). Ketidaksetaraan ini terdapat di Arab Saudi di mana perempuan menghadapi ketidaksetaraan dalam hal berpartisipasi dalam bidang pendidikan (Hamdan, 2005).

Gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak didukung oleh masyarakat (Cholil & Sudirman, 2019). Perempuan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pendidikan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa (Djajadiningrat, M. 1992). Perbedaan kesempatan dalam berpartisipasi antara laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan telah menjadi fenomena sejak lama, di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya, di Timur Tengah, seperti di negara Arab Saudi, Mesir dan Timur lainnya, hal ini anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah (Amin, 2016).

Isu perempuan dan pendidikan menarik untuk terus dikaji oleh para sarjana nasional dan internasional terutama ketika menyangkut kesenjangan pendidikan islam. Termasuk isu perempuan dan pendidikan di Arab Saudi dalam hal tantangan dan pencapaiannya (Hamdan, 2005).Isu pengalaman perempuan mengenyam pendidikan tinggi di Inggris(Fauzia, Ahmad, 2007). Dalam konteks Indonesia, kajian yang berkaitan dengan isu perempuan dan pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kajian tersebut mencakup topik terkait apakah pendidikan memberdayakan perempuan Indonesia (Rohman, 2013). Topik tentang perempuan Muslim Indonesia dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia (Qibtiyah, 2009).

Studi lain membahas upaya dan strategi untuk mengatasi kesenjangan gender yaitu menginvestigasi betapa sulitnya menghadapi kompleksitas persoalan dalam menangani ketidaksetaraan gender bagi perempuan untuk mengakses pendidikan (Cholil & Sudirman, 2019). Kajian lain juga mengkaji isu tentang perempuan dan peran partisipasi perempuan dalam Pendidikan Islam di Indonesia dan Arab Saudi dalam menempati posisi strategis untuk menjalankan dan mengambil keputusan dalam organisasi tertentu (Muluk, 2014).Kesenjangan ini juga terjadi pada partisipasi pendidikan perempuan di PTKI dan lembaga ma'had aly, akses pendidikan dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga ma'had aly, terdapat perbedaan tingkat partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi Islam untuk studi Islam dibandingkan dengan ma'had aly(Nawang Sari et al., 2020).Dalam masyarakat dan sekolah, perempuan ditempatkan pada posisi yang menyulitkan untuk menikmati kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Hal ini juga dapat terjadi di lembaga pendidikan Islam(Srimulyani, 2007).Di Indonesia, hal yang menjadi perhatian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah dengan menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah (Zilfa, 2017).

Dari beberapa penelitian sebelumnya, belum banyak yang telah dikaji secara langsung berkaitan dengan bagaimana partisipasi perempuan dalam Pendidikan

Islam di Indonesia dan Arab Saudi . Artikel ini juga mengkaji kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam pendidikan, dan latar belakang sejarah. Partisipasi perempuan dan kesenjangan pendidikan berbagai upaya pembangunan dilakukan untuk memberikan ruang seluas-luasnya dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan perempuan.

B. METHOD

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan penelitian ini studi pustaka (*library reseach*), yaitu studi penelaahan dan kajian terhadap berbagai buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah: topik yang dipecahkan(Suharsimi Arikunto,2002). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan baik berupa buku, jurnal, artikel, yang mendukung berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan objek kajian penelitian(Nasir, 2005,). Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif tentang konstruksi sosial tentang perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan (*gender inequalities*) di Indonesia dan Saudi Arabia. Tahapan selanjutnya dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah(Masrukhin,2015,).

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Pendidikan Islam di Indonesia

Perhatian ulama tentang peran penting perempuan Islam dalam bidang pendidikan dan keilmuan Islam telah digambarkan secara menarik oleh beberapa ulama terkenal. Sebagaimana yangditulis oleh sejarawan Muslim, al-Khatib al-Baghdadi dalam kamus biografinya berjudul Tarikh Baghdad, memuat biografi sejumlah ulama perempuan. Begitu juga al-Sakhawi menulis beberapa kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-15 terutama al-Daw' al-Lami', khusus tentang perempuan yang diberijudul Kitab al-Nisa'.

Dalam terakhirdiberikanbiografisekitar 1075 perempuan, 411 orang diantaranya mempunyai pendidikan agama yang tinggi(Azyumardi

Azra, 1999) Berdasarkan data dari laporan gender UNDP, Indonesia memiliki Gender Inequality Index sebesar 0.494, yang menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketidaksetaraan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat juga perbedaan dalam Indeks Pembangunan Manusia, dengan indeks laki-laki mencapai 0.706, sementara perempuan hanya mencapai 0.655 (UNDP, 2014). Data ini memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap isu kesetaraan gender, dan upaya pengarus utama gender (PUG) menjadi fokus dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia di Indonesia.

Referensi terkait peraturan dan hukum Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) menyatakan kesesuaian konvensi ini dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa "semua warga negara bersamaan dengan kedudukan mereka dalam hukum dan pemerintahan." Prinsip ini sejalan dengan pendekatan kesetaraan antara pria dan wanita dalam peraturan (Kelompok Kerja Convention Watch, 2007). Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional juga memandang pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mengintegrasikan aspek gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program-program pembangunan nasional (Kelompok Kerja Convention Watch, 309).

Upaya strategis dan terencana pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melibatkan berbagai sektor pemerintahan, termasuk tingkat hierarki yang paling dekat dengan masyarakat, seperti Bupati/Walikota. Kesuksesan dalam pembangunan saat ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan politik. Salah satu indikator dalam mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal ini

mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan menciptakan kondisi yang merata dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Table: Gender Inequality Index 2015

No	Negara Tetangga	Gender Inequality Index (IndeksKetidaksetaraan Gender) (2014)	Gender Development Index (Index pembangunan gender) (2014)	Human Development Index (HDI) (2014)	
				Female	Male
1.	Singapura	0.088	0.985	0.898	0.912
2.	Malaysia	0.209	0.947	0.753	0.795
3.	Thailand	0.380	1.000	0.726	0.726
4.	Indonesia	0.494	0.927	0.655	0.706
5.	Filipina	0.420	0.977	0.649	0.664

Sumber: UNDP Report

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia mengalami ketidaksetaraan dibandingkan dengan laki-laki, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia berada pada tingkat yang rendah, yakni 0.927. Hal ini berdampak pada pembangunan di Indonesia, di mana perempuan juga merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu diberdayakan dan memiliki akses yang setara terutama dalam bidang pendidikan.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, pemerintah Indonesia berfokus pada pengembangan kebijakan, program, dan proyek yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender, terutama untuk perempuan. Beberapa pendekatan dalam usaha ini termasuk:

1. Pendekatan Kesejahteraan: Menganggap perempuan sebagai penerima pasif dan berfokus pada peran reproduktif dalam keluarga. Ini dapat mengakibatkan ketergantungan perempuan pada pihak lain.

2. Pendekatan Keadilan: Berusaha mengurangi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal pembagian kerja dan hak-hak gender.
2. Pendekatan Anti-Kemiskinan: Fokus pada mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, khususnya di kalangan perempuan berpenghasilan rendah.
3. Pendekatan Efisiensi: Mendorong partisipasi ekonomi perempuan untuk mencapai keadilan gender.
4. Pendekatan Penguatan Diri: Meningkatkan kekuasaan dan kemandirian perempuan.

Semua pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Peningkatan pendidikan perempuan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berkontribusi pada ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta negara.

Pembangunan manusia Indonesia akan semakin membaik dan bersaing dengan negara lain. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya, salah satunya dengan regulasi yang menekankan pengarusutamaan gender di sektor pendidikan. Contohnya, pada tahun 2010, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena masih terdapat kesenjangan gender dalam proses pembelajaran dan partisipasi masyarakat di madrasah.

Regulasi ini menjadi strategis dalam mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa kesenjangan ini terjadi: pertama, persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan anak laki-laki lebih penting karena diharapkan akan menjadi penopang ekonomi keluarga. Kedua, orientasi kebijakan pendidikan yang belum memadai dalam memperhatikan aspek perbedaan gender. Ketiga, akses pendidikan yang tidak mencukupi, terutama di daerah pedalaman, yang membuat beberapa keluarga lebih memilih anak perempuan untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan yang memerlukan biaya.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender melalui berbagai lembaga formal, informal, dan non formal. Ini penting agar kesenjangan gender semakin berkurang, karena pada prinsipnya, semua manusia setara.

3. Pendidikan Islam di Arab Saudi

Ketika berbicara tentang situasi perempuan di Arab Saudi, ini sangat dipengaruhi oleh ideologi negara dan konsep domestifikasi perempuan. Hal ini terkait dengan interpretasi agama yang cenderung selektif dan tradisional, yang membatasi kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan perempuan di Arab Saudi sering kali terfokus pada persiapan menjadi ibu rumah tangga yang baik, sesuai dengan peran alamiah mereka seperti mengajar, merawat, atau memberikan perawatan medis (Al Alhareth et al., 2015).

Pendidikan perempuan di Arab Saudi telah mengalami peningkatan, terbukti dengan meningkatnya jumlah perempuan yang mengejar pendidikan tinggi di luar negeri, dari 3.879 pada tahun 2004/2005 menjadi 35.700 pada tahun 2011/2012 (Al Alhareth et al., 2015). Namun, akses pendidikan bagi perempuan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan universitas, masih menjadi tantangan, kecuali bagi mereka yang tinggal di daerah utama seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Pada proses pembelajaran, pendidikan perempuan di Arab Saudi telah memanfaatkan teknologi canggih, seperti fasilitas internet yang memungkinkan pelajar perempuan untuk belajar secara daring dengan guru laki-laki. Selain itu, metode pembelajaran telah berkembang sejak 2007 dengan adopsi sistem pendidikan modern, termasuk metode aktif, kerja kelompok, dan sebagainya. Ini menunjukkan kemajuan signifikan, mengingat pendidikan sebelumnya di Arab Saudi lebih mengandalkan metode hafalan dan pengulangan dari guru.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Arab Saudi tercermin dalam pendirian Pendidikan Tinggi untuk perempuan pertama kali di Riyadh pada tahun 1962, diikuti oleh Universitas King Abdul Azis di Jeddah pada tahun 1967. Saat ini, terdapat 24 universitas yang menerima mahasiswa

perempuan. Untuk melihat data lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Arab Saudi, Anda dapat merujuk pada tabel yang tersedia.

4. Table: Gender Inequality Index 2015

No	Negara Tetangga	Gender Inequality Index (IndeksKetidaksetaraan Gender) (2014)	Gender Development Index (Index pembangunan gender) (2014)	Human Development Index (HDI) (2014)	
				Female	Male
1.	Qatar	0.524		0.853	0.854
2.	Saudi Arabia	0.284	0.901	0.778	0.86 4
3.	Iran	0.515	0.858	0.689	0.80 4
4.	Turki	0.359	0.902	0.716	0.79 3
5.	Mesir	0.573	0.868	0.633	0.72 9
6.	Yaman	0.744	0.739	0.4140	56 0

Sumber: UNDP Report

D. ANALYSIS

1. Analisis Komparatif Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Islam

Perbandingan pendidikan bagi perempuan di beberapa negara yakni Indonesia dengan Saudi Arabia , memiliki persamaan dalam konstruksi sosiokultur, di mana pengaruh interpretasi keagamaan yang dijadikan instrumen legitimasi superioritas laki-laki sangat tampak. Hal ini mempengaruhi ruang gerak perempuan pada wilayah publik, termasuk hak untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Hal itu mulanya tidak hanya terjadi pada negara yang penduduknya Muslim, terlihat dari gerakan kaum feminis gelombang pertama yang tuntutan tersebut bahkan dimulai oleh *Mary Wollstonecraft* yang kemudian

secara kongkret Mary mendirikan sekolah khusus untuk perempuan di Newington Green, London bagian Utara. Sedangkan hal yang sama juga dilakukan oleh Bahithat al-Badiyah dan Musa Nabawiyyah yang bahkan mendedikasikan dirinya sebagai pendidik, yang merupakan bagian dari upaya agar perempuan Mesir terdidik serta memiliki akses pada ruang publik. Di Indonesia juga menorehkan sejarah yang sama, R.A Kartini, yang harus berusaha mendapatkan pendidikan yang setara.

Domistifikasi perempuan nampaknya menjadi permasalahan yang juga merambat pada akses perempuan di bidang pendidikan. Selain hal di atas, paradigma masyarakat yang menganggap bahwa jurusan yang sesuai dengan naluri perempuan seperti pada jurusan bahasa, pendidikan, keperawatan, ilmu-ilmu sosial menjadi halangan bagi perempuan yang memiliki potensi di bidang teknik misalnya. Kondisi ini juga melanda Malaysia, di mana pada jurusan teknik, hanya sedikit diminati perempuan.

Dari kondisi tersebut, maka pendidikan Islam merupakan entitas penting yang secara sistematis-metodologis dapat dijadikan instrumen dalam mewujudkan kesetaraan. Termasuk pula dalam menghasilkan ulama-ulama perempuan. Musdah Mulia, menguraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu (Musdah Mulia, 2005, n.d.): *Pertama*, seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan baik pada tingkat nasional maupun daerah, harus dipastikan memihak atau paling tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan. Bukan hanya akses dalam semua level pendidikan, melainkan juga menjamin adanya kesetaraan dalam segenap output pendidikan. *Kedua*, perbaikan dalam sistem administrasi dengan menggunakan analisis gender. Reformasi dalam sistem administrasi sangat diperlukan, misalnya, dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam berbagai posisi dan jabatan strategis di bidang operasional pendidikan, seperti kepala sekolah, kepala tata usaha dan pengawas pendidikan. *Ketiga*, perbaikan dalam sistem kurikulum yang menjamin terwujudnya content pendidikan yang berperspektif gender dan terbangunnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan, terutama hak-hak reproduksi. *Keempat*, penyempurnaan bahan-bahan

pendidikan dengan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Melakukan revisi terhadap buku-buku yang bias gender. Hal ini masih sering ditemukan pada materi-materi pelajaran yang memvisualisasikan perempuan pada posisi inferior. Padahal seharusnya materi yang diajarkan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang memposisikan manusia laki-laki dan perempuan dalam posisi sentral sebagai subjek pendidikan. *Kelima*, peningkatan kualitas pendidik. Laki-laki dan perempuan yang peka dan sadar gender. *Keenam*, perlunya memperbaiki sistem pengkaderan ulama yang digelar MUI dan lembaga-lembaga Pendidikan Islam lainnya termasuk materi dan sistem seleksinya, sehingga responsif dengan tuntunan keadilan gender, dan juga mempertimbangkan kepentingan dan partisipasi perempuan (Musdah Mulia, 2005.).

Pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan meliputi membuat sekolah lebih mudah diakses, memperpendek jarak ke sekolah, terutama akan mendorong anak-anak perempuan agar bersekolah. Resiko keamanan dan reputasi sosial menjadi berkurang apabila lokasi sekolah dekat dengan lokasi komunitas. Pastikan fasilitas WC yang terpisah dan tertutup tersedia. Meningkatkan kualitas guru dan naikan jumlah guru perempuan. Tetapkan kuota minimum guru perempuan. Oleh karena hanya sedikit perempuan yang dapat memenuhi persyaratan standar pengajaran, maka penting sekali untuk melakukan perekrutan lokal secara aktif, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan membawa pelatihan ke lokasi yang dekat dengan komunitas akan menarik kaum perempuan yang semula tidak tertarik untuk mengajar karenakendala budaya atas mobilitas perempuan, ketiadaan rumah, atau karena tanggung jawab keluarga (Dina Hermina, 2014 *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*).

Langkah-langkah untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan Islam melibatkan berbagai aspek. Pertama, reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadith yang cenderung bias gender dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah agama digunakan sebagai alasan untuk mendukung diskriminasi gender.

Kedua, perlu disusun kurikulum nasional yang menghilangkan pemisahan tegas antara laki-laki dan perempuan, dan kurikulum lokal yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan. Kurikulum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Ketiga, pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan informal, termasuk penyediaan fasilitas belajar di tingkat lokal, seperti kelurahan hingga Kabupaten/Kota, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Keempat, perempuan perlu diberdayakan di sektor ekonomi, terutama melalui kegiatan industri rumah tangga (home industry), sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada laki-laki.

Kelima, pendidikan politik perempuan harus menjadi fokus untuk meningkatkan pemahaman politik mereka. Ini penting untuk mengubah persepsi bahwa politik adalah domain laki-laki saja.

Keenam, perlu meningkatkan keterampilan perempuan, baik yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai ekonomis. Ini harus terjadi terutama di pedesaan untuk mencapai keseimbangan dengan perempuan perkotaan yang memiliki keterampilan yang lebih baik.

Ketujuh, sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu ditingkatkan agar perempuan memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang.

Semua langkah ini merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pendidikan Islam, yang memiliki dampak positif pada pembangunan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan pedoman pengarusutamaan gender di madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pembelajaran.

E. CONCLUSION

Dalam konteks perbandingan pendidikan perempuan di beberapa negara, seperti Indonesia dan Arab Saudi, terdapat kesamaan dalam aspek konstruksi sosial budaya dan dampak dari interpretasi agama yang digunakan untuk

melegitimasi superioritas laki-laki. Dampak dari hal ini memengaruhi perempuan dalam hal akses pendidikan yang lebih tinggi dan peran dalam masyarakat secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang terjadi pada partisipasi pendidikan perempuan khususnya dalam Pendidikan Islam, hal ini terlihat masih ada pembatasan kesempatan mengenyam pendidikan dan masih ada bias gender terdapat dalam materi pelajaran dan teks-teks klasik yang harus direinterpretasi. Seluruh pihak yang terkait dalam institusi pendidikan Islam harus memiliki sensitifitas terhadap kesenjangan yang terjadi, baik dalam proses pembelajaran, maupun pada buku-buku pelajaran yang bias gender, masih sering ditemukan pada materi-materi pelajaran yang memvisualisasikan perempuan pada posisi *inferior* dan laki-laki pada posisi *superior*. Termasuk pula dalam kajian teks-teks keagamaan yang dijumpai mengandung interpretasi misogini (membenci perempuan). Hal ini membutuhkan kepekaan serta kesadaran untuk merekonstruksi konteks ketidaksetaraan tersebut secara bersama-sama.

REFERENSI

- Al Alhareth, Y., Al Dighrir, I., & Al Alhareth, Y. (2015). Review Of Women's Higher Education In Saudi Arabia. *American Journal Of Educational Research*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.12691/education-3-1-3>
- Amin, Q. (2016). (N.D.). *Amin, Q. (2016). Tahrir Al-Mar'ah. Kairo: Hindun.*
- AzyumardiAzra,(1999). "Membongkar Peranan Perempuan Dalam Bidang Keilmuan",. Dalam Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Jppr, 1999), H. 70.
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). Gender Equality In Islamic Family Law: Breaking The Chain Of Domestic Violence To Achieve Harmonious Family. *Kafa'Ah: Journal Of Gender Studies*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>
- Dina Hermina,2014 *PelaksanaanPengarutamaanGender.Pdf.* (N.D.).
- Djajadiningrat, M. (1992). (N.D.). *Ibuism And Priyayization: Path To Power?. In Locher-Scholten, E. & A. Niehof. Indonesian Women In Focus. Leiden: Kitvl Press.*
- Eko Bambang Subiyantoro, 2005 & www.theindonesianinstitute.com, Diakses Pada 15 September 2017. (N.D.). "Sensitivitas Gender

- Kebijakan Pemerintahan Sby”, Dalam Www.Theindonesianinstitute.Com, Diakses Pada 13 Januari 2023.*
- Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, 2011. (N.D.). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011), 902.*
- Fauzia, Ahmad, 2007. (N.D.). *Muslim Women’s Experiences Of Higher Education In Britain.*
- Gonibala, O. R. (2007). *Fenomena Bias Gender Dalam Pendidikan Islam. 4.*
- Haifa A. Jawad,. (N.D.). *The Rights Of Women In Islam: An Authentic Approach (New York: St. Martin’s Press, Inc.), 27.*
- Hamdan, 2005, J. P. I., 6(1), 42-64. (N.D.). *Perempuan Dan Pendidikan Di Arab Saudi: Tantangan Dan Prestasi Jurnal Pendidikan Internasional, 6(1), 42-64.*
- Masrukhin, 2015. (N.D.). *Metode Penelitian Kualitatif (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), H.2.*
- Muluk, S. (2014). Women And Leadership In Islamic Higher Education In Indonesia. *Englisia Journal, 1(2)*. <https://doi.org/10.22373/Ej.V1i2.27>
- Musdah Mulia, 2005. (N.D.). *Musdah Mulia, Muslim Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 122.*
- Nasir, 2005. (N.D.). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).*
- Nawangsari, D., Elhady, A., & Salam, N. (2020). Women’s Access To Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 193–204.* <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9760>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik, 2010. (N.D.). *Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.*
- Qibtiyah, A. (2009). Indonesian Muslim Women And The Gender Equality Movement. *Journal Of Indonesian Islam, 3(1), 168.* <https://doi.org/10.15642/jiis.2009.3.1.168-196>
- Rohman, A. (2013). Does Education Empower The Indonesian Women? *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2367284>

- Samarakoon, S., & Parinduri, R. A. (2015). Does Education Empower Women? Evidence From Indonesia. *World Development*, 66, 428–442. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.002>
- Srimulyani, E. (2007). Muslim Women And Education In Indonesia: The PondokPesantren Experience. *Asia Pacific Journal Of Education*, 27, 85–99. <https://doi.org/10.1080/02188790601145564>
- Suharsimi Arikunto, 2002. (N.D.). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Zilfa, R. (2017). Telaah Komparatif Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Islam Di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Dan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education Studies)*, 5(2), 264. <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.264-287>